

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu faktor atau kriteria untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menempuh pendidikan akan membantu seseorang untuk mengubah perilaku kearah yang lebih baik, dan tidak hanya perilaku namun dapat merubah atau memengaruhi hal lain, seperti pola pikir, karakter, cara kerja dan lainnya. Sehingga setiap manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan tanpa memandang status atau latar belakangnya.

Begitupun di Indonesia, setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan. Berdasarkan Undang-undang pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berisikan “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran” yang mengartikan bahwa pendidikan dasar bukan hanya hak warga negara tetapi juga sebuah kewajiban negara untuk memberikan pendidikan yang dibutuhkan oleh warga negara¹.

Hak tersebut harus terpenuhi, jadi sifatnya tidak bisa ditawar karena jika seseorang tidak mendapatkan pendidikan, ia tidak mampu bersaing dengan orang lain dari ranah regional, nasional maupun internasional. Pada konteks ini, Indonesia, setiap warga negara haknya dikatakan terpenuhi apabila sudah terpenuhi kebutuhan pendidikan. Hal ini juga bertujuan agar Indonesia dapat menghasilkan warga negara yang mampu bersaing dengan bangsa lain. Walaupun pada kenyataannya pemenuhan akan hak ini bukan suatu hal yang mudah, karena sampai hari ini angka putus sekolah di Indonesia masih cukup tinggi, yang mengartikan bahwa belum meratanya pemenuhan hak mendasar khususnya pada bidang pendidikan.

¹ Ibid, hlm.9

Gambar 1.1 Statistik APTS tahun ajaran 2020/2021 dan 2022/2023



Sumber: [instagram.com/lenterabagibangsa](https://www.instagram.com/lenterabagibangsa)

Menurut data terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), pada tahun 2022 terdapat 4.087.288 anak di Indonesia yang tidak bersekolah. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak anak di Indonesia yang belum mendapatkan hak fundamental mereka untuk mengenyam pendidikan². Dan berdasarkan Data Badan Pusat Statistik pada tahun ajaran pendidikan 2022/2023 anak putus sekolah (APS) di Indonesia sebanyak 76.834 anak dari tingkat SD-SMA/SMK³. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah di Indonesia adalah ketimpangan dalam penyediaan sarana pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak meratanya jumlah sekolah negeri di berbagai wilayah, khususnya jenjang SMP dan SMA. Akibat ketimpangan ini, banyak anak usia sekolah terpaksa tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu jarak dan biaya. Jarak yang jauh antara tempat tinggal dan sekolah, serta biaya pendidikan yang tinggi. Dengan adanya kondisi ini, semakin dipicu dengan faktor ekonomi yang lemah atau kemiskinan, sehingga

² dpr.go.id (2023) Banyak Anak Putus Sekolah, Puan Ingatkan Pemerintah Wajib Beri Akses Pendidikan. *DPR RI*.

³ Datakemdikbud (2023) Infografis Pendidikan 2022/2023. *Sekjen Kemdikbudristek*. vi (44)

anak yang tidak masuk sekolah negeri dan berada pada keluarga miskin terpaksa putus sekolah karena tidak mampu membiayai pendidikan di sekolah swasta.

Permasalahan ini sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya kota Depok. Berdasarkan data yang diperoleh dari Data Pokok Pusat Data Pendidikan (Dapodik Pusdatin) di Kota Depok anak yang tidak bersekolah mencapai 15.453 anak.⁴

Salah satu faktor tingginya angka putus sekolah di Kota Depok adalah ketimpangan dalam penyediaan sarana pendidikan, khususnya jenjang SMP dan SMA/SMK. Data dari Kemendikbudristek menunjukkan bahwa terdapat 237 sekolah SD Negeri di Kota Depok, namun hanya terdapat 27 sekolah SMP Negeri. Hal ini berarti sekitar 90% lulusan SDN tidak dapat melanjutkan pendidikan ke SMPN. Akibatnya, ribuan lulusan SDN terpaksa masuk ke sekolah swasta, dan bagi mereka yang tidak mampu, terpaksa putus sekolah. Kesenjangan ini semakin diperparah dengan terbatasnya jumlah SMA Negeri (hanya 16 sekolah) dan SMK Negeri (hanya 4 sekolah) di Kota Depok⁵.

Padahal, Kota Depok telah menerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2023 predikat Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) selama enam tahun berturut-turut sejak 2017. Namun kenyataannya masih dihadapkan pada permasalahan ketimpangan dalam penyediaan sarana pendidikan. Predikat KLA yang diraih Kota Depok seharusnya menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dan kewajiban anak, termasuk hak atas pendidikan. Namun, tingginya angka putus sekolah di Kota Depok, khususnya pada jenjang SMP dan SMA/SMK, akan menjadi pertanyaan besar atas komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak dan juga pada penghargaan yang telah diraih⁶.

Meskipun Kota Depok telah meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) selama enam tahun berturut-turut, kenyataannya masih banyak anak di kota ini yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pendidikan

⁴ Dinas Pendidikan Kota Depok (2023) Angka Putus Sekolah SD MI. *satudata.depok.go.id*.

⁵ Arif. (2022, September). Angka Putus Sekolah Di Kota Depok.

⁶ Depok, P. K. (2023, Juli). Kota Depok Raih Penghargaan Kota Layak Anak 2023 Predikat Nindya.

mereka. Permasalahan ekonomi dan akses pendidikan yang mahal menjadi hambatan bagi banyak anak untuk mendapatkan hak mereka atas pendidikan yang layak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara predikat KLA yang diterima dengan kondisi nyata yang dihadapi anak-anak di Kota Depok.

Meskipun solusi untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah sudah ada, yakni melalui program pendidikan kesetaraan, program ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Program pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang diperuntukan bagi warga negara yang belum berkesempatan memperoleh pendidikan secara formal (sekolah) setara SD/MI (paket A), SMP/MTs (paket B), dan SMA/MA (paket C). Walaupun ditujukan untuk masyarakat, program pendidikan kesetaraan belum sering didengar oleh masyarakat karena kurang akses untuk memanfaatkannya.

Kintamani menjelaskan bahwa pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat di PKBM memiliki banyak manfaat, termasuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepribadian peserta didik⁷. Sesuai dengan fungsinya, PKBM adalah wadah yang digunakan sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan, itu alasan diadakannya pendidikan nonformal yang ditujukan kepada masyarakat dengan kondisi khusus.

PKBM merupakan lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikan kesetaraan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik maupun nonakademik seseorang dengan fokus sasarannya adalah masyarakat. Dengan masih adanya angka putus sekolah di Indonesia menunjukkan bahwa masih kurangnya informasi terkait PKBM di kalangan masyarakat khususnya bagi anak-anak yang mengalami permasalahan putus sekolah. Meskipun informasi tentang pendidikan kesetaraan masih minim, jumlah anak yang membutuhkan pendidikan ini terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan kesetaraan sebagai landasan bagi setiap anak untuk mendapatkan haknya dalam menempuh

⁷ Kintamani DH, I. (2012). Kinerja Pendidikan Kesetaraan sebagai Salah Satu Jenis Pendidikan Nonformal. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 18(1), 65–84.

pendidikan. Dan pemerintah perlu meningkatkan peran masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam upaya mengurangi angka putus sekolah.

Solusi untuk mengadakan PKBM sudah dilakukan di Kota Depok. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah PKBM atau sekolah nonformal yang tersebar di Kota Depok. Sesuai dengan Peraturan Daerah No 14 tahun 2021 pasal 88 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional sebagai penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah.

Tabel 1.1 Data PKBM di Kota Depok

No	Wilayah	%	Total Sekolah	Total Kirim	Total Sisa
1	Kec. Beji	100%	6	6	0
2	Kec. Bojongsari	100%	7	7	0
3	Kec. Cilodong	100%	5	5	0
4	Kec. Cinere	100%	2	2	0
5	Kec. Limo	100%	3	3	0
6	Kec. Pancoran Mas	88%	9	8	1
7	Kec. Tapos	85%	7	6	1
8	Kec. Sukmajaya	83%	12	10	2
9	Kec. Cipayung	80%	5	4	1
10	Kec. Sawangan	75%	8	6	2
11	Kec. Cimanggis	57%	14	8	6
Total		83.33%	78	65	13

Sumber: dapo.kemdikbud.go.id

Ada banyak jumlah PKBM yang tercatat di Kota Depok, yaitu sebanyak 78 PKBM yang tersebar di 11 Kecamatan. Dari 78 sekolah yang tercatat hanya 65 sekolah yang masih aktif melakukan kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan data tersebut, dicantumkan penilaian oleh dinas pendidikan terkait kinerja PKBM melalui sistem akreditasi.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan standar nasional lembaga pendidikan formal maupun nonformal, yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat⁸. Akreditasi berperan sebagai sistem penjaminan kualitas eksternal yang diandalkan oleh lembaga berwenang untuk memberikan

⁸ Anwar, S., & Setiawan, D. (2020). Suksesi Akreditasi Sebagai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknologi*, 2(2), 88–103.

pengakuan resmi atas kemampuan suatu satuan pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Hal ini didasarkan pada penilaian terhadap kesesuaian satuan pendidikan dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Data Pokok Kemendikbudritek (Dapodik), dari total 65 PKBM yang aktif melakukan kegiatan belajar mengajar, ada sebanyak 20 PKBM terakreditasi C, 8 PKBM dan hanya 1 PKBM terakreditasi A. Dan sebanyak 36 PKBM yang belum melakukan akreditasi.

Berlokasi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Arafah berhasil meraih prestasi dengan mendapatkan akreditasi A. Hal tersebut menjadikannya satu-satunya PKBM di Kota Depok dengan predikat tersebut. PKBM Arafah menawarkan berbagai program edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat, meliputi program kesetaraan yaitu Paket A, B dan C, kelompok belajar usaha (KBU), dan perpustakaan masyarakat.

Berdasarkan pra survei, peneliti menemukan fakta yang dapat memberikan gambaran tentang lembaga pendidikan ini secara umum salah satu alasan PKBM Arafah mampu mendapat akreditasi A. Karena PKBM Arafah selama kurang lebih 10 tahun berdiri dapat menghasilkan alumni-alumni yang mampu berdaya di masyarakat. Para alumni PKBM Arafah dapat masuk ke dunia profesional di berbagai bidang seperti bidang kuliner, konstruksi, keuangan dan masih banyak lagi.

Keberhasilan dalam memberikan pembelajaran yang maksimal, didukung adanya fasilitas yang cukup baik dan lengkap untuk menunjang proses belajar dan keberhasilan kegiatan belajar di PKBM Arafah. Kelayakan ruang kelas di PKBM juga terlihat, PKBM Arafah satu kawasan dengan SMPIT Arafah yang merupakan sekolah formal yang terakreditasi A sehingga diperhatikannya kualitas sarana dan prasarana untuk peserta didik pada saat belajar seperti ruang belajar *full AC*, memiliki 2 lab. komputer dan adanya perpustakaan.

Kondisi tersebut membuat peneliti ingin mengetahui dan memahami aspek apa saja yang memengaruhi kinerja PKBM sehingga dapat terakreditasi A.

Karena akreditasi melibatkan berbagai aspek penilaian dari segi akademik, kompetensi peserta didik dan pendidik, keterlibatan masyarakat dan masih banyak lagi. Karena melibatkan banyak factor yang perlu diperhatikan oleh PKBM Arafah sehingga dapat mendapatkan penilaian yang unggul. Peneliti berharap lembaga pendidikan nonformal lainnya dapat meningkatkan kualitasnya agar lebih maksimal dalam memfasilitasi peserta didik melalui pendidikan nonformal.

Melalui penelitian ini, kiranya mampu menjadi bahan pembelajaran dalam menjalankan program kesetaraan dari tingkat dasar hingga menengah. Dan mampu memberikan masukan yang berharga bagi pengelola PKBM, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan nonformal khususnya di Kota Depok.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini peneliti membuat fokus penelitiannya yaitu “Bagaimana kinerja PKBM Arafah sebagai satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi A?”

C. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja PKBM Arafah Kota Depok sebagai satuan pendidikan nonformal yang berakreditasi A.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi lembaga pendidikan nonformal dalam meningkatkan kinerja dan kualitas di satuan PKBM
2. Memberikan pengalaman kepada peneliti dalam mengelola satuan PKBM di Kota Depok